



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ayodhia G. L. Kalake
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Maret 2025

PIHAK KEDUA,

Agus Harimurti Yudhoyono

PIHAK PERTAMA,

Ayodhia G. L. Kalake

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP. 1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A
SP. 2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi, dan Kerja Sama	Rp5.329.232.000
2	Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Rp5.750.000.000
3	Penyelenggaraan Layanan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Rp3.754.968.000
4	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran, Keuangan, Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp153.125.142.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp167.959.342.000*

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp44.932.444.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Ayodhia G. L. Kalake

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSP.1.1	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan RB terhadap Pelaksanaan SAKIP di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	85				√
IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai hasil implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (unggul): Nilai absolut>90-100 b. A (unggul): Nilai absolut>80-90 c. BB (baik): Nilai absolut>70-80 d. B (baik): Nilai absolut>60-70	78,60				√
IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang Merupakan Kesimpulan Pemeriksa Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WTP			√	
IKSP.1.4	Nilai SPIP Terintegrasi	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Mencapai Tujuan Pengendalian	>3				√
IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025	93		√		
IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	4,52			√	

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengukur reformasi hukum. Penilaian ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (istimewa) dengan nilai 90–100 b. A (sangat baik) dengan nilai 80–90 c. BB (baik) dengan nilai 70–80 d. B (cukup baik) dengan nilai 60–70	A				√
IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	Hasil Penilaian Kementerian PANRB terhadap Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Cakupan Evaluasi meliputi Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Memuaskan: 4,2 - 5,0 (84%-100%) b. Sangat Baik: 3,5 - 4,2 (70%-84%) c. Baik: 2,6 - <3,5 (52%-<70%) d. Cukup: 1,8 - <2,6 (36%-<52%) e. Kurang: <1,8 (<36%)	78%				√
IKSP.2.2	Nilai JDIH Nasional	Peringkat/Penilaian yang Diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menilai Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Nasional. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Eka Acalapati: 87-100 (100%) b. Dwi Tungga: 76-86 (86%) c. Tri Buntara: 66-75 (75%) d. Catur Dandani: 0-65 (65%)	Eka Acalapati				√
IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Informatif, dengan nilai 90 -100	Informatif				√

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
		b. Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c. Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d. Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e. Tidak Informatif, dengan nilai <39,9					

Jakarta, 20 Maret 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan


Ayodhia G. L. Kalake